

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa proses penyusunan dan pengawalan anggaran oleh instansi pemerintah bukanlah proses yang sederhana dan sepenuhnya teknokratis. Sebaliknya, proses ini adalah arena yang kompleks, di mana birokrat menggunakan berbagai strategi komunikasi, negosiasi, dan kompromi untuk memastikan rencana kerja mereka terdani. Keberhasilan dalam proses ini mencerminkan kemampuan birokrat untuk beradaptasi dengan dinamika politik dan birokrasi di tingkat pemerintahan daerah. Proses ini sangat didominasi oleh negosiasi dan kompromi. Keputusan anggaran tidak hanya berfokus pada aspek teknis program, tetapi juga mempertimbangkan dinamika politik dan kepentingan non-teknis. Adanya tarik-menarik kepentingan, termasuk potensi praktik informal, merupakan bagian tak terhindarkan dari proses ini.

Keberhasilan strategi ini terlihat dari konsistensi alokasi anggaran yang diterima instansi pemerintah. Anggaran yang diusulkan berhasil dipertahankan, bahkan pada beberapa program, terjadi peningkatan alokasi meskipun efektivitas teknisnya dapat dipertanyakan. Ini menunjukkan bahwa kemampuan birokrat untuk bermanuver dalam ranah non-teknis menjadi faktor penentu utama dalam mengamankan anggaran.

Pada akhirnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengawalan anggaran sangat bergantung pada kapasitas adaptif birokrat dalam membangun jaringan, melakukan negosiasi strategis, dan berkompromi dalam lingkungan yang kompleks dan penuh kepentingan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan:

1. Perlu dikembangkan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel di setiap tahapan penyusunan anggaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga penetapan, berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
2. Kapasitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu diperkuat untuk melakukan evaluasi yang objektif terhadap usulan anggaran dari instansi pemerintah (OPD). TAPD harus menggunakan instrumen analisis yang komprehensif untuk menilai kelayakan program berdasarkan urgensi, dampak, dan efisiensi, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan non-teknis.
3. Penting untuk membangun sistem *checks and balances* yang efektif antara eksekutif dan legislatif dalam proses penganggaran. Harus ada mekanisme yang memastikan bahwa aspirasi legislatif benar-benar mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan tidak hanya kepentingan politik.
4. Perlu dikembangkan pedoman operasional yang jelas mengenai pembagian alokasi anggaran antarsektor di dalam satu instansi pemerintah. Pedoman ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan dan prioritas pembangunan yang objektif, guna menghindari inefisiensi dan memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.

